

Abdul Nashar
St. Jawiah

KBM
INDONESIA

KEBIJAKAN PUBLIK

Membangun Integritas dan
Akuntabilitas Pemerintahan
di Era Modern



KEBIJAKAN PUBLIK

Membangun Integritas dan Akuntabilitas
Pemerintahan di Era Modern

Penulis

Abdul Nashar

St. Jawiah



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

KEBIJAKAN PUBLIK

Membangun Integritas dan Akuntabilitas Pemerintahan di Era Modern

Copyright @2025 By Abdul Nashar dan St. Jawiah
All right reserved

Penulis

Abdul Nashar
St. Jawiah

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruahey, Drs., M.Sc
Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-885-8

Cetakan ke-1, November 2025

14,8 x 21 cm, viii + 309 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025179407, 13 November 2025

Pencipta

Nama : **Abdul Nashar dan St. Jawiah**
Alamat : Jl Ahmad Yani Lrg Ilmiah No.24 Kel. Mataiwoi, Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93117
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Abdul Nashar dan St. Jawiah**
Alamat : Jl Ahmad Yani Lrg Ilmiah No.24 Kel. Mataiwoi, Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93117
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **KEBIJAKAN PUBLIK: Membangun Integritas dan Akuntabilitas Pemerintahan di Era Modern**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 13 November 2025, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001019667

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.s
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko.SH.MH.
NIP 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT., atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Kebijakan Publik II: Etika, Profesionalisme, dan Tantangan Pemerintahan Modern* ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan kelanjutan dari karya sebelumnya, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Praktik Strategis*, yang berfokus pada dasar teori dan mekanisme proses kebijakan publik. Pada buku ini, pembahasan diarahkan pada aspek etika dan profesionalisme aparatur serta tantangan moral birokrasi di tengah perubahan tata kelola pemerintahan modern.

Perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi digital, dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih serta responsif menjadikan etika publik dan profesionalisme sebagai fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman konseptual dan praktis bagi mahasiswa, akademisi, serta praktisi pemerintahan dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral, tanggung jawab publik, dan akuntabilitas ke dalam praktik kebijakan publik.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Universitas Sulawesi Tenggara, atas dukungan akademik dan suasana ilmiah yang kondusif bagi penulisan karya ini. Penghargaan juga kami sampaikan kepada rekan sejawat, mahasiswa, serta para pembaca yang telah memberikan masukan dan inspirasi selama proses penyusunan. Terima kasih kepada CV. Karya Bakti Makmur, Yogyakarta, yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini sebagai bagian dari upaya memperkaya literatur kebijakan publik di Indonesia.

Kami menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan menjadi rujukan dalam membangun aparatur negara yang beretika, profesional, dan berintegritas.

Kendari, Oktober 2025

Penulis,

Dr. Abdul Nashar, M.Si.

Dra. St. Jawiah, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN: ORIENTASI KAJIAN TEORI KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1
1.1. Latar Belakang Kajian Teori dalam Ilmu Pemerintahan	1
1.2. Hubungan Antara Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik dalam Ilmu Pemerintahan	7
1.3. Perkembangan Pemikiran Ahli Dalam dan Luar Negeri tentang Kebijakan dan Pelayanan Publik	11
1.4. Tujuan dan Signifikansi Kajian Teori Kebijakan serta Pelayanan Publik dalam Pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan	17
1.5. Ruang Lingkup, Metodologi, dan Struktur Buku	21
BAB 2 PERKEMBANGAN HISTORIS DAN PARADIGMA DALAM KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK	28
2.1. Akar Historis Perkembangan Studi Kebijakan Publik	28
2.2. Pergeseran Paradigma dalam Studi Kebijakan Publik	33

2.3.	Paradigma Kebijakan Publik dalam Konteks Pemerintahan Indonesia Modern -----	37
2.4.	Sintesis dan Arah Baru Kajian Kebijakan Publik di Era Transformasi Pemerintahan -----	43
2.5.	Evolusi Metodologi dan Epistemologi Analisis Kebijakan -----	50
BAB 3 TEORI-TEORI KLASIK KEBIJAKAN PUBLIK DARI BARAT-----		56
3.1.	Teori Sistem (System Theory) – David Easton----	56
3.2.	Teori Inkremental (Incrementalism) – Charles E. Lindblom-----	61
3.3.	Teori Kelompok dan Elit (Group Theory dan Elite Theory)-----	66
3.4.	Teori Kelembagaan (Institutional Theory) – March & Olsen -----	73
3.5.	Teori Pilihan Publik (Public Choice) — Buchanan & Tullock -----	77
BAB 4 TEORI DAN PENDEKATAN KONTEMPORER KEBIJAKAN PUBLIK -----		83
4.1.	Pergeseran Paradigma: Dari NPM ke NPS, Digital-Era Governance, dan Collaborative Governance -----	83
4.2.	Evidence-Based Policy dan Behavioral Public Policy-----	88
4.3.	Co-Creation dan Service Design dalam Kebijakan Publik -----	94
4.4.	Evaluasi Adaptif dan Policy Learning-----	100
4.5.	Tata Kelola AI, Sistem Kompleks, dan Desain Kebijakan Berbasis Data -----	105

**BAB 5 PARADIGMA KONTEMPORER DALAM KEBIJAKAN
PUBLIK ----- 112**

5.1. Paradigma Governance dan Kolaborasi dalam
Kebijakan Publik ----- 112

5.2. Paradigma Evidence-Based Policy (EBP) dan Data-
Driven Governance ----- 122

5.3. Paradigma Inovasi dan Adaptasi Kebijakan di Era
Disrupsi ----- 128

5.4. Paradigma Keadilan Sosial dan Etika dalam
Kebijakan Publik ----- 134

5.5. Resiliensi Kebijakan dan Tata Kelola
Ketidakpastian ----- 140

**BAB 6 INOVASI DAN TRANSFORMASI DALAM KEBIJAKAN
PUBLIK ----- 145**

6.1. Inovasi Kebijakan di Era Disrupsi ----- 145

6.2. Co-Creation dan Kebijakan Partisipatif----- 151

6.3. Smart Governance dan Kebijakan Berbasis
Teknologi ----- 157

6.4. Tantangan dan Prospek Inovasi Kebijakan di Era
Digital ----- 163

6.5. Tata Kelola Data dan AI-Ethical Governance dalam
Inovasi Kebijakan ----- 168

**BAB 7 METODOLOGI DAN TOOLS DALAM ANALISIS
KEBIJAKAN PUBLIK ----- 173**

7.1. Metode Kualitatif dan Kuantitatif dalam Analisis
Kebijakan ----- 173

7.2. Tools Digital untuk Analis Kebijakan di Era
Transformasi Digital ----- 179

7.3. Mapping Stakeholder dan Analisis Jaringan
Kebijakan ----- 185

7.4. Integrasi Data, Pembelajaran Kebijakan, dan
Pengambilan Keputusan Adaptif----- 191

7.5.	Etika Algoritma, Audit AI, dan Akuntabilitas Data dalam Analisis Kebijakan -----	199
------	--	-----

BAB 8 KAPASITAS INSTITUSI DAN PROFESIONALISME ANALIS KEBIJAKAN ----- 204

8.1.	Kapasitas Kelembagaan dalam Proses Kebijakan -----	204
8.2.	Kompetensi dan Etika Analisis Kebijakan Publik -----	210
8.3.	Penguatan Kapasitas SDM Analisis Kebijakan di Era Digital -----	214
8.4.	Studi Kasus dan Praktik Institusionalisasi di Indonesia -----	218
8.5.	Manajemen Pengetahuan Kebijakan dan Model Kematangan Kelembagaan -----	224

BAB 9 ARAH STRATEGIS DAN TANTANGAN MASA DEPAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK ----- 233

9.1	Reformasi Tata Kelola Kebijakan Publik di Era Kompleksitas -----	233
9.2.	Transformasi Birokrasi dan Inovasi Pemerintahan Adaptif -----	240
9.3.	Kolaborasi Multisektor dan Kekuatan Jaringan Kebijakan -----	245
9.4.	Tantangan Global dan Agenda Masa Depan Pemerintahan Cerdas -----	252
9.5.	Kedaulatan Data, Kecerdasan Buatan, dan Etika Algoritmik dalam Kebijakan Publik -----	258

BAB 10 PENUTUP: REFLEKSI, REFORMASI, DAN ARAH MASA DEPAN KEBIJAKAN PUBLIK ----- 264

10.1	Merangkum Pelajaran dari Proses dan Praktik Kebijakan Publik -----	264
10.2.	Tantangan dan Peluang Reformasi di Era Pemerintahan Terbuka -----	269

10.3. Refleksi Etika, Nilai, dan Kepemimpinan Kebijakan Publik -----	274
10.4. Menyongsong Pemerintahan Berkelanjutan dan Inklusif di Masa Depan -----	278
10.5. Peta Jalan Perubahan: Agenda Aksi, Ukur Dampak, dan Menjaga Daya Tahan Reformasi-----	284
DAFTAR PUSTAKA (VERSI REVISI DAN TERVERIFIKASI) -----	291
Sumber Nasional -----	291
Sumber Internasional -----	293
Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi -----	299
INDEKS TEMATIK DAN KONSEPTUAL-----	300
TENTANG PENULIS -----	308

DAFTAR PUSTAKA

(Versi Revisi dan Terverifikasi)

Sumber Nasional

- Abidin, Z. (2018). *Kebijakan Publik di Indonesia: Proses, Analisis, dan Studi Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bintoro, R. (2020). *Etika dan Kepemimpinan dalam Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2020). *Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2022). *Reformasi Birokrasi di Era Digital: Antara Harapan dan Tantangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2022). *Birokrasi dan Inovasi Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Haryono, T. (2022). *Transformasi Digital dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kurniawan, T. (2022). Data-driven policy innovation in Indonesian local government. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 155–172.
- Kurniawan, T. (2023). *Collaborative Governance dan Efektivitas Kebijakan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nashar, A. (2023). *Dasar Ilmu Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Feniks Muda Sejahtera.
- Nashar, A., & St. Jawiah. (2024). *Tata Kelola: Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah*. Kendari: CV. Arden Jaya.
- Nashar, A., & St. Jawiah. (2025). *Transformasi Pelayanan Publik: Teori, Evaluasi, dan Strategi Masa Depan*. Yogyakarta: CV. Selfietera Indonesia.
- Nashar, A., & St. Jawiah. (2025). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Praktik Strategis*. Yogyakarta: CV. Karya Bakti Makmur.
- Ndraha, T. (2011). *Konsolidasi Pemerintahan Daerah: Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2022). *Kebijakan Publik di Era Disrupsi: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (2005). *Mewirausahakan Birokrasi: Reinventing Government* (Terj. A. Rosyid). Jakarta: PPM.
- Pramusinto, A., & Purwanto, E. A. (2018). *Birokrasi dan Governance di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Rachmawati, R., & Pradana, D. (2022). Digital collaboration in Indonesian governance: Opportunities and challenges. *Jurnal Transformasi Pemerintahan*, 14(1), 55–72.
- Rasyid, R. (2017). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Grasindo.
- Sedarmayanti. (2021). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Implementasi Menuju Pemerintahan Efektif dan Bersih*. Bandung: Refika Aditama.
- Suwarno, Y. (2021). *Kepemimpinan Kolaboratif dalam Inovasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2018). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Thoha, M. (2021). *Etika Pemerintahan: Perspektif Pancasila dan Good Governance*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wibawa, S. (2019). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Gava Media.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Sumber Internasional

- Ada Lovelace Institute. (2022). *Participatory Data Stewardship: A Framework for Involving People in the Use of Data*. London: Ada Lovelace Institute.
- Ansell, C., & Gash, A. (2021). Collaborative governance: A decade of lessons learned and future directions. *Public Administration Review*, 81(1), 23–36.
- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public Governance as Co-Creation: A Strategy for Revitalizing the Public Sector and*

- Rejuvenating Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Arendt, H. (1969). *On Violence*. New York: Harcourt Brace.
- Arundel, A., & Es-Said, B. (2022). *Building Innovative Public Organizations: Culture, Learning, and Adaptation in Government*. Paris: OECD Publishing.
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2019). *Public Value and Co-Creation in Governance: Renewing Public Administration for a Complex World*. Routledge.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Bovens, M., & Wille, A. (2020). *Ethics and Legitimacy in Contemporary Public Governance*. Palgrave Macmillan.
- Brandsen, T., & Honingh, M. (2018). *Co-Creation and Co-Production in Public Services: Urgent Issues in Theory and Practice*. Routledge.
- Cairney, P. (2020). *Understanding Public Policy: Theories and Issues* (3rd ed.). Red Globe Press.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2022). *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government*. New York: Routledge.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2022). *The Routledge Handbook of Digital Era Governance*. New York: Routledge.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2020). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). New York: Routledge.

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2022). *Collaborative Governance Regimes* (2nd ed.). Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. New York: St. Martin's Press.
- Farra, M., & Pissarides, C. (2023). *Quantum Governance: Rewiring the Foundation of Public Policy*. London: Emerald Publishing.
- Fischer, F. (2017). Knowledge, politics, and post-truth in the 21st century. *Policy Sciences*, 50(1), 1–19.
- Floridi, L., & Cows, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review*, 1(1), 1–15.*
- Florini, A., & Sharma, S. (2022). *Governing the Digital World: Power, Politics, and Ethics*. Singapore: Springer.
- Fraser, N. (2018). *Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition*. Routledge.
- Habermas, J. (2019). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: Polity Press.
- Hartley, J. (2015). Innovation in governance and public services: Past and future. *Public Money & Management*, 35(1), 1–8.
- Head, B. W. (2021). *Wicked Problems in Public Policy: Understanding and Responding to Complex Challenges*. Palgrave Macmillan.

- Head, B. W., & Alford, J. (2017). Wicked problems: Implications for public policy and management. *Administration & Society*, 49(6), 711–739.*
- Heifetz, R. (1994). *Leadership Without Easy Answers*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). *The Policy Design Primer: Choosing Instruments and Modes of Policy Intervention*. Routledge.
- Janssen, M. (2022). AI ethics in public governance: Balancing innovation and responsibility. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101–118.
- Janssen, M., & Estevez, E. (2023). Data governance for policy analytics: Enabling responsible and accountable AI in the public sector. *Government Information Quarterly*, 40(1), 101720.*
- Janssen, M., & Kuk, G. (2016). The challenges and limits of big data algorithms in public decision making. *Government Information Quarterly*, 33(3), 371–377.*
- Kettunen, P., & Rantala, K. (2021). Green policy innovation in the public sector. *Environmental Policy and Governance*, 31(2), 125–140.*
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. London: Sage Publications.
- Leslie, D. (2020). *Understanding Artificial Intelligence Ethics and Safety*. London: The Alan Turing Institute.
- Mittelstadt, B. D. (2019). Principles alone cannot guarantee ethical AI. *Nature Machine Intelligence*, 1(11), 501–507.*

- Morley, J., Floridi, L., Kinsey, L., & Elhalal, A. (2021). From what to how: Translating AI ethics principles into practice. *Science and Engineering Ethics*, 27(1), 15.*
- Mulgan, G. (2019). *Social Innovation: How Societies Find the Power to Change*. Policy Press.
- NIST. (2023). *AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology.
- Nye, J. S. (2021). *Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump*. Oxford: Oxford University Press.
- OECD. (2021). *Innovation Playbook for Government: Building Agile and Adaptive Public Sector Institutions*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2024). *AI, Data, and Accountability: Building Trust in Digital Governance*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2024*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2025). *Government at a Glance 2025*. Paris: OECD Publishing.
- Osborne, S. P. (2020). *Public Service Logic: Creating Value through Public Service Delivery*. New York: Routledge.
- Osborne, S. P., & Brown, K. (2013). *Handbook of Innovation in Public Services*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Parsons, W. (2021). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Peters, B. G. (2021). *The Politics of Bureaucracy* (7th ed.). New York: Routledge.

- Peters, B. G. (2021). *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Raji, I. D., et al. (2020). Closing the AI accountability gap. *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT20)*, 33–44.
- Rawls, J. (2019). *A Theory of Justice* (Rev. ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sabatier, P. A. (2007). *Theories of the Policy Process* (2nd ed.). Boulder, CO: Westview Press.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- Saltelli, A., & Di Fiore, M. (Eds.). (2023). *The Politics of Modelling: Numbers Between Science and Policy*. Oxford: Oxford University Press.
- Selbst, A. D., et al. (2019). Fairness and abstraction in sociotechnical systems. *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT19)*, 59–68.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Senge, P. (2006). *The Fifth Discipline*. New York: Doubleday.
- Stiglitz, J. E. (2018). *Globalization and Its Discontents Revisited*. New York: W.W. Norton & Company.
- Stone, D. (2012). *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making* (3rd ed.). New York: W.W. Norton & Company.
- Torring, J. (2019). *Collaborative Innovation in the Public Sector: Theoretical and Practical Perspectives*. Oxford University Press.

Torring, J. (2021). *Collaborative Innovation in the Public Sector: Theoretical and Practical Perspectives*. Cheltenham: Edward Elgar.

UNDP. (2021). *Inclusive Governance: Leaving No One Behind in Public Policy Processes*. New York: UNDP.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang *Jabatan Fungsional Analis Kebijakan*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*.

INDEKS TEMATIK DAN KONSEPTUAL

A

Accountability (Akuntabilitas) – prinsip tata kelola publik dan indikator utama good governance; Bab V, Bab VIII

Actor (Aktor Kebijakan) – peran negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam proses kebijakan; Bab I.3, Bab III

Advocacy Coalition Framework – teori koalisi advokasi (Sabatier); Bab III

AI (Artificial Intelligence/Kecerdasan Buatan) – pemanfaatan AI dalam inovasi kebijakan dan etika algoritmik; Bab VI, Bab IX.5

Aksi Kolektif – basis teori governance kolaboratif; Bab V

Analisis Kebijakan – tahapan, teknik, dan paradigma; Bab IV–VII

Arah Kebijakan Publik – refleksi dan prospek masa depan; Bab X

Asas Keadilan Sosial – orientasi nilai kebijakan publik; Bab I, Bab V

Audit Algoritmik – mekanisme penilaian bias dan akuntabilitas AI; Bab IX.5

B

Behavioral Public Policy – kebijakan berbasis perilaku dan nudge theory; Bab I.5, Bab IV

Birokrasi Adaptif – reformasi struktur pemerintahan; Bab II, Bab V

Big Data – sumber kebijakan berbasis data; Bab VI, Bab IX

Bounded Rationality – rasionalitas terbatas (Herbert Simon); Bab I.5, Bab III

C

Co-Creation – kolaborasi antaraktor dalam perumusan kebijakan; Bab VI.2

Collaborative Governance – tata kelola kolaboratif; Bab V, Bab VI.2

Complexity (Kompleksitas) – konteks dinamis kebijakan publik; Bab I, Bab IX

Civic Participation (Partisipasi Warga) – esensi demokrasi kebijakan; Bab I, Bab V

Citizen Data Trust – model tata kelola data berbasis publik; Bab IX.5

Cost-Benefit Analysis (CBA) – teknik evaluasi kebijakan; Bab IV.2

D

Data Governance (Tata Kelola Data) – pengelolaan data publik yang etis; Bab VI.5, Bab IX.5

Decentralization (Desentralisasi) – pendelegasian kewenangan daerah; Bab II

Decision Making (Pengambilan Keputusan) – model rasional, inkremental, dan campuran; Bab IV.3

Digital Era Governance – paradigma pemerintahan digital; Bab IV, Bab VI

Disruption (Disrupsi) – tantangan dan peluang inovasi kebijakan; Bab VI.1

E

Economic Efficiency (Efisiensi Ekonomi) – prinsip dalam NPM dan evaluasi kebijakan; Bab IV, Bab V

E-Government – digitalisasi layanan publik; Bab VI.3

Ethical Governance (Tata Kelola Etis) – fondasi moral kebijakan publik; Bab V, Bab VIII

Evaluation (Evaluasi Kebijakan) – model, indikator, dan pendekatan; Bab VII, Bab X

Evidence-Based Policy (EBP) – kebijakan berbasis bukti ilmiah; Bab IV.2, Bab VI.2

Explainability (Keterjelasan Algoritmik) – prinsip AI akuntabel; Bab IX.5

F

Feedback (Umpan Balik Kebijakan) – siklus pembelajaran; Bab III, Bab X

Formulasi Kebijakan – proses identifikasi masalah dan penentuan alternatif; Bab III, Bab IV

Floridi, Luciano (2019) – etika informasi dan martabat manusia; Bab IX.5

G

Game Theory – model analisis keputusan kebijakan; Bab V.2

Good Governance – prinsip tata kelola pemerintahan modern; Bab V, Bab VIII

Governance Mindset – cara berpikir pemerintahan kolaboratif; Bab I.5, Bab X

H

Head, Brian W. – konsep evidence-informed policy dan epistemic accountability; Bab I.5, Bab VIII

Human-in-the-Loop – partisipasi manusia dalam keputusan berbasis AI; Bab IX.5

Hybrid Governance – kombinasi negara, pasar, dan masyarakat sipil; Bab VI

I

Implementation (Implementasi Kebijakan) – strategi dan tantangan; Bab V.3, Bab VII

Innovation Policy (Inovasi Kebijakan) – kebijakan sebagai eksperimen sosial; Bab VI

Institusionalisme Baru – teori lembaga dan perubahan kebijakan; Bab III

Interoperabilitas Data – keterhubungan sistem informasi publik; Bab IX.5

Integrity (Integritas Publik) – etika dan profesionalisme; Bab VIII

J

Jaringan Kebijakan (Policy Network) – hubungan antaraktor dan institusi; Bab III, Bab V

Just Governance – keadilan sebagai dimensi tata kelola; Bab V

K

Kedaulatan Data – kontrol nasional atas data publik; Bab IX.5
Kebijakan Berbasis Nilai Publik – orientasi moral kebijakan; Bab I, Bab V

Kebijakan Inklusif – partisipasi masyarakat rentan; Bab V, Bab IX
Kebijakan Publik – definisi, tujuan, dan karakteristik; Bab I
Kepemimpinan Adaptif (Adaptive Leadership) – Heifetz; Bab X
Keterbukaan Pemerintahan (Open Government) – transparansi dan partisipasi; Bab V

Kitchin, Rob (2014) – politik data dan etika digital; Bab IX.5

L

Lasswell, Harold D. – pionir policy sciences; Bab I.5, Bab II
Learning State (Negara Pembelajar) – negara yang terus belajar dari kebijakan; Bab IX

Legitimasi Publik – dasar moral kebijakan publik; Bab I, Bab V, Bab VIII

M

Margetts & Dorobantu (2021) – tata kelola data digital; Bab VI.5
Mazmanian & Sabatier (1983) – model implementasi kebijakan; Bab V

Monitoring dan Evaluasi (Monev) – teknik pengawasan kebijakan; Bab VII

Multi-Stakeholder Governance – kolaborasi lintas sektor; Bab V, Bab VI

N

New Public Management (NPM) – paradigma efisiensi dan hasil; Bab IV

New Public Service (NPS) – paradigma partisipasi dan nilai publik; Bab IV, Bab V

Normatif dan Empiris – pendekatan dalam analisis kebijakan; Bab I.5

O

Open Data – keterbukaan informasi publik; Bab VI.5, Bab IX

Ostrom, Elinor (1990) – polycentric governance; Bab I.5, Bab V

Outcome & Output – ukuran hasil kebijakan; Bab VII

P

Participatory Governance – tata kelola partisipatif; Bab V

Policy Cycle (Siklus Kebijakan) – formulasi–implementasi–evaluasi; Bab III–VII

Policy Learning – pembelajaran kebijakan; Bab X

Policy Mix – kombinasi instrumen kebijakan; Bab IV

Policy Network Theory – teori jaringan aktor; Bab III

Public Value – nilai publik sebagai tujuan kebijakan; Bab I, Bab V

Privacy by Design – perlindungan data sejak perancangan; Bab IX.5

R

Regulatory Sandbox – ruang uji inovasi kebijakan digital; Bab VI.5, Bab IX.5

Rasionalitas Terbatas – konsep Simon tentang keterbatasan keputusan; Bab I.5

Reformasi Birokrasi – penyederhanaan dan transformasi kelembagaan; Bab V, Bab VIII

S

Satu Data Indonesia – integrasi data nasional; Bab IX.5

Smart Governance – pemerintahan cerdas berbasis teknologi; Bab VI.3

Social Justice (Keadilan Sosial) – nilai etis kebijakan publik; Bab V, Bab IX

Stakeholder Mapping – pemetaan aktor kebijakan; Bab VII.3

Stewardship (Pengasuhan Data & Nilai Publik) – etika pengelolaan kebijakan; Bab VIII

Sustainability (Keberlanjutan Kebijakan) – prinsip intergenerasional; Bab V, Bab X

T

Tata Kelola Etis dan Transparan – prinsip governance modern; Bab V, Bab VIII

Teknokrasi dan Nilai – keseimbangan antara bukti dan moral; Bab I.5

Transformasi Digital Pemerintahan – perubahan struktur layanan; Bab VI.3, Bab IX

Trust Infrastructure (Infrastruktur Kepercayaan) – kerangka akuntabilitas digital; Bab IX.5

U

Umpan Balik Kebijakan (Feedback Loop) – siklus evaluatif pembelajaran; Bab VII, Bab X

V

Value for Money – efisiensi dalam pelayanan publik; Bab IV

Values in Policy (Nilai dalam Kebijakan) – fondasi moral pembuatan kebijakan; Bab I, Bab V

W

Weiss, Carol H. (1979) – enlightenment model dalam pengaruh riset kebijakan; Bab I.5

Wilson, Woodrow (1887) – pemisahan politik–administrasi; Bab II

Z

Zuboff, Shoshana (2019) – surveillance capitalism dan etika privasi; Bab IX.5

TENTANG PENULIS

Dr. Abdul Nashar, M.Si.

Dr. Abdul Nashar, M.Si. adalah dosen tetap pada Program Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara. Beliau telah lama berkecimpung dalam bidang Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik dengan fokus pada isu desentralisasi, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Dalam kiprah akademiknya, Dr. Abdul Nashar dikenal sebagai sosok yang berintegritas, terbuka, dan memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan ilmu pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Selain aktivitas akademik, beliau juga telah berpengalaman lebih dari 15 tahun sebagai tenaga ahli/tim pakar DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dalam bidang legislasi, perencanaan pembangunan daerah, dan analisis kebijakan publik. Pengalaman tersebut memperkaya perspektifnya dalam mengaitkan teori pemerintahan dengan praktik penyusunan kebijakan di tingkat daerah.

Sebagai akademisi, peneliti, dan praktisi kebijakan publik, Dr. Abdul Nashar aktif menulis dan melakukan riset mengenai reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, serta penguatan

kapasitas aparatur daerah. Karya-karyanya mencerminkan komitmen terhadap profesionalisme ASN, transparansi birokrasi, dan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dra. St. Jawiah, M.Si.

Dra. St. Jawiah, M.Si. adalah dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Tenggara. Beliau memiliki pengalaman luas dalam bidang administrasi publik, manajemen pemerintahan, dan kebijakan daerah. Sebagai pendidik dan peneliti, beliau berkomitmen menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan.

Selain aktif mengajar, Dra. St. Jawiah terlibat dalam penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada penguatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan kelembagaan lokal. Dedikasinya dalam dunia akademik dan sosial menjadikannya salah satu figur penting dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan di Universitas Sulawesi Tenggara, dengan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola publik di wilayah Sulawesi Tenggara.